

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah Daerah yaitu sistem penyelenggaraan pemerintahan yang merujuk pada otoritas administratif dan pelayanan di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara, dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi, daerah Kabupaten serta daerah Kota. Setiap daerah Provinsi, daerah Kabupaten serta daerah Kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pada prinsipnya dalam Undang-Undang tersebut mengubah sistem penyelenggaraan Pemerintah Daerah sehingga Pemerintah Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pemberdayaan, peran masyarakat serta layanan publik untuk masyarakat (Riswanto, 2016)

Kinerja instansi pemerintah memiliki kaitan erat dengan akuntabilitas, transparansi dan pengawasan (Riswanto, 2016). Pemahaman mengenai konsep kinerja organisasi publik dapat dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yang pertama melihat kinerja organisasi publik dari perspektif birokrasi itu sendiri, dan yang kedua melihat kinerja organisasi publik dari perspektif kelompok sasaran

atau pengguna jasa organisasi publik. Khusus mengenai organisasi publik berkaitan erat dengan produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas, serta persamaan pelayanan (Mardiasmo, 2006 dalam Auditya, dkk 2013).

Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berarti bahwa proses penganggaran tersebut dimulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan yang harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPR dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga memiliki hak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana maupun pelaksanaan tersebut (Mardiasmo, 2002).

Akuntabilitas yaitu kewajiban untuk memberi pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang, badan hukum, pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Adisasmita, 2011 dalam Purnama dan Nadirsyah 2016).

Transparansi merupakan salah satu prinsip *Good Governance*. Menurut Pasaribu (2011) dalam Auditya, dkk (2013) mengatakan transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya, yaitu informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi

tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Menurut Mardiasmo (2004) dalam Auditya, dkk (2013) transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

Pengawasan keuangan daerah merupakan bagian integral dari pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan pengertiannya, pengawasan keuangan daerah pada dasarnya mencakup segala tindakan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan rencana, ketentuan, dan undang-undang yang berlaku (Baswir, 1999 dalam Purnama dan Nadirsyah 2016).

Pengawasan kinerja tidak bisa hanya ditentukan dalam tenggang waktu yang singkat, atau dalam pengawasannya hanya disimpulkan kinerja pada satu periode saja. Namun harus berkala dan berkelanjutan agar mengetahui apakah kinerja yang diukur mengalami progres atau bahkan bisa jadi mengalami penurunan. Apalagi kabupaten Jepara sudah 2 periode dipimpin oleh Kepala Daerah yang sama, di akhir masa jabatan Kepala Daerah ini pengawasan kinerja yang dilakukan oleh DPRD terkait akuntabilitas, transparansi dan pengawasan pemerintah daerah sangatlah penting untuk melihat perkembangan kinerja pemerintah daerah dari awal masa jabatannya hingga saat ini.

Adapun penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Wiguna, dkk (2015) Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengawasan Keuangan

Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Adiwirya (2015) dalam penelitiannya memperoleh hasil pengujian bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja SKPD Kota Denpasar.

Berdasarkan latar belakang di atas serta penelitian-penelitian sebelumnya yang memberikan pemahaman betapa pentingnya penerapan akuntabilitas, transparansi dan pengawasan dalam peningkatan kinerja pemerintahan. Dalam penerapan akuntabilitas, transparansi dan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara tersebut sudah terlaksana sesuai dengan prosedur yang ada, namun hal tersebut belum bisa berjalan dengan baik, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jepara).**

## **1.2 Ruang Lingkup Penelitian**

Untuk mengantisipasi masalah agar pembahasan tidak meluas, maka penulis menekankan pada Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jepara).

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan uraian masalah yang telah di uraikan maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Akuntabilitas Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara ?
2. Apakah Transparansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara ?
3. Apakah Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara ?
4. Apakah Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara ?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan adanya hubungan yang saling mempengaruhi antar variabel :

1. Untuk mengetahui Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara
2. Untuk mengetahui Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara
3. Untuk mengetahui Pengaruh Pengawasan Laporan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara
4. Untuk mengetahui Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan Laporan Keuangan Daerah secara simultan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara

## 1.5 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya.

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

a. Bagi Pemerintah Kabupaten Jepara

Sebagai bahan masukan untuk referensi tentang pengetahuan akuntansi yang melibatkan peran akuntabilitas, transparansi dan pengawasan suatu entitas sektor publik (nirlaba) khususnya Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara.

b. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Jepara

Sebagai bahan masukan untuk peningkatan pemahaman akuntabilitas, transparansi dan pengawasan keuangan daerah dan hubungannya dengan kinerja Pemerintah Daerah.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan masukan, referensi dan literatur bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian di rumpun akuntansi sektor publik yang berkaitan tentang akuntabilitas, transparansi dan pengawasan.